

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Justice Collaborator atau kerjasama dengan pelaku kejahatan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana melibatkan beberapa tahapan dan prosedur yang berbeda di setiap negara atau yurisdiksi. Proses umum yang dilakukan oleh kepolisian atau badan penegak hukum meliputi identifikasi dan penangkapan pelaku, pemantauan dan pengumpulan informasi, pemeriksaan saksi dan korban, penyelidikan forensik, analisis bukti, identifikasi pelaku, penangkapan, penahanan, dan proses hukum selanjutnya.
2. Penerapan justice collaborator dalam penanganan kasus pembunuhan berencana memiliki tujuan utama untuk mengungkap kebenaran tentang kejahatan tersebut dan melindungi kepentingan publik. Namun, penting juga untuk menjaga keseimbangan antara memberikan insentif kepada pelaku kejahatan dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan masyarakat secara keseluruhan.

#### **B. Saran-Saran**

1. Perlindungan dan Keamanan. Pihak penegak hukum harus memberikan perlindungan dan keamanan yang memadai bagi Justice Collaborator. Ini termasuk menjaga kerahasiaan identitas mereka, memberikan perlindungan fisik, dan memastikan bahwa mereka terlindungi dari ancaman atau represalias oleh pelaku lain atau kelompok kejahatan terkait.

2. Keseimbangan Antara Imbalan dan Hukuman. Dalam memberikan imbalan kepada pelaku kejahatan yang menjadi Justice Collaborator, perlu dijaga keseimbangan antara memberikan insentif yang cukup untuk mendorong kerjasama, sambil tetap mempertahankan sanksi yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tetap bertanggung jawab atas perbuatan mereka.